BADAN POM

REVIU RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

		Halaman
	DAFTAR ISI	i
	DAFTAR GAMBAR	ii
	DAFTAR GRAFIK	iii
	DAFTAR TABEL	iv
	DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TUJUAN	2
	C. RUANG LINGKUP	2
BAB 2	HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2020-2024	3
	A. REVIU TERHADAP BAB I PENDAHULUAN	3
	B. REVIU TERHADAP BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN	14
	C. REVIU TERHADAP BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	23
	D. REVIU TERHADAP BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	28
	E. REVIU TERHADAP LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN	35
	F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	52
BAB 3	PENUTUP	53

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
GAMBAR 1	Struktur Organisasi BBPOM di Bandung (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM	3
GAMBAR 2	Struktur Organisasi BBPOM di Bandung (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM	4
GAMBAR 3	Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024	22
GAMBAR 4	Peta Strategi BSC Loka POM di Bogor dan Loka POM di Tasikalaya Tahun 2020-2024	23

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
GRAFIK 1	Pemetaan Kebutuhan Pegawai 2020-2024 BBPOM di Bandung	5
GRAFIK 2	Profil Gender Pegawai BBPOM di Bandung	6
GRAFIK 3	Profil Jabatan Pegawai BBPOM di Bandung	6
GRAFIK 4	Profil Pendidikan Pegawai BBPOM di Bandung	7

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL 1	Pemetaan Kebutuhan Pegawai 2020-2024 BBPOM di Bandung	5
TABEL 2	Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Bandung Tahun 2020	8
TABEL 3	Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024	14
TABEL 4	Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, Kebijakan dan Strategi BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024	17
TABEL 5	Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020-2024	24
TABEL 6	Perubahan Strategi BPOM Tahun 2020-2024	26
TABEL 7	Perubahan Target Indikator Kinerja BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024	31
TABEL 8	Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	34
TABEL 9	Matriks Perubahan Kegiatan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja BBPOM di Bandung Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024	36
TABEL 10	Matriks Perubahan Kegiatan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024	44
TABEL 11	Matriks Perubahan Kegiatan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kota TasikmalayaTahun 2020-2024	48

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171
Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546
Email : bpom_bandung@pom.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
NOMOR HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, perlu dilakukan reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organsasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2020-2024.

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171
Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546
Email : bpom_bandung@pom.go.id

Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Kedua : Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024 sebagaimana diaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun Dokumen Perencanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Oktober 2021.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 13 Desember 2021
Kepala Balai Besar POM di Bandung

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.
NIP. 19650713 199103 2 001

Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Jakarta
2. Sekretaris Utama Badan POM RI di Jakarta
3. Inspektur Utama Badan POM RI di Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
NOMOR HK.02.02.12A.12A5.12.21.110
TAHUN 2021
TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TAHUN 2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, BPOM telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yang dijadikan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM dalam menyusun dokumen perencanaan, diantaranya adalah Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.03.103.05.20.1124A Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Rencana Stategis BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi dan telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Stategis BPOM Tahun 2020-2024. Dengan demikian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung juga perlu melakukan reviu Rencana Stategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024 berdasarkan Reviu Rencana Stategis BPOM Tahun 2020-2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan BPOM dapat teroperasionalisasikan dan diimplementasikan dengan baik.

B. TUJUAN

Tujuan Reviu Rencana Strategis Balai Besar di Bandung Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung.
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Rencana Strategis Balai Besar di Bandung Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan stategis, visi, misi,tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target pada level sasaran kegiatan.

BAB II
HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TAHUN 2020-2024

A. REVIU TERHADAP BAB I PENDAHULUAN

1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPT di Lingkungan BPOM termasuk BBPOM di Bandung. Adapun perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud, sebagai berikut:

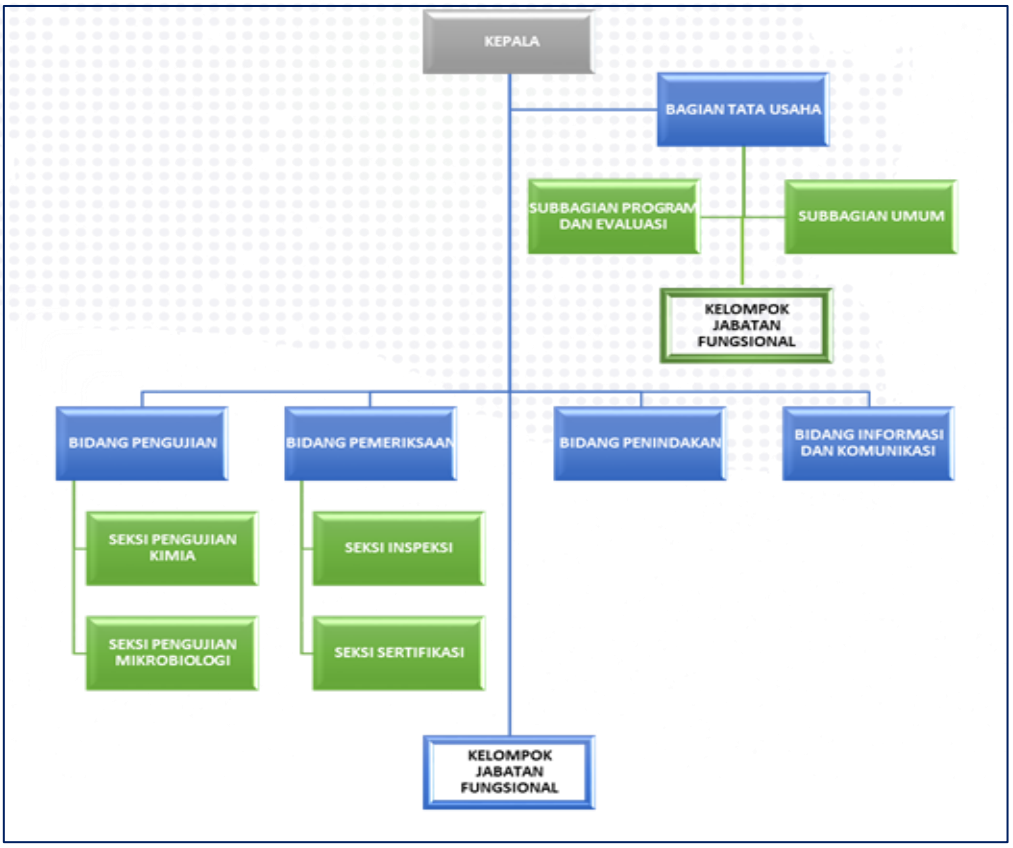

Gambar 1
Struktur Organisasi BBPOM di Bandung (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

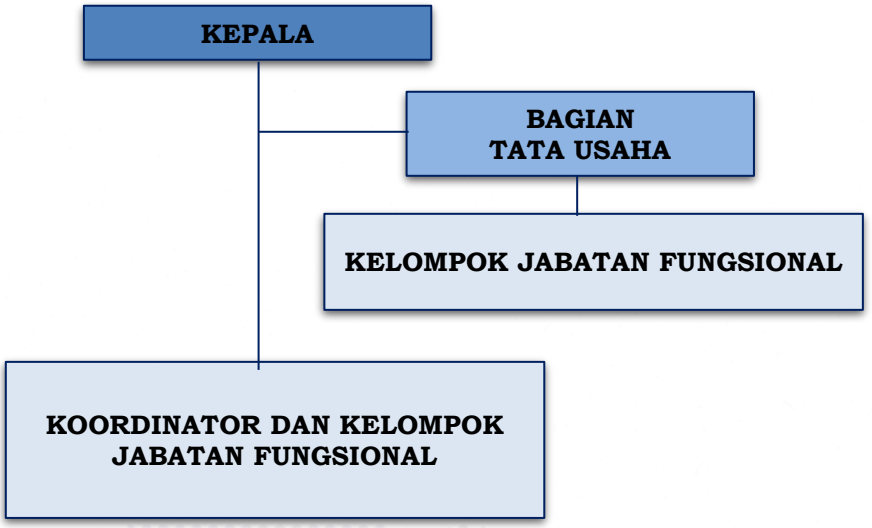

Gambar 2
Struktur Organisasi BBPOM di Bandung (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas terlihat perubahan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang semula terdiri atas: a. Kepala; b. Bidang Pengujian; c. Bidang Pemeriksaan; d. Bidang Penindakan; e. Bidang Informasi dan Komunikasi; f. Bagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional berubah menjadi organisasi Balai Besar POM di Bandung yang terdiri atas: a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja

Pada Renstra BBPOM di Bandung tahun 2020-2024, telah disusun kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Bandung. Pada tahun 2020, jumlah Pegawai eksisting sejumlah 129 sedangkan kebutuhan sejumlah 311, sehingga ada gap sejumlah 182 pegawai. Pemetaan kebutuhan pegawai tersebut, selanjutnya dilakukan dalam rentang waktu hingga tahun 2024 dengan memperhitungkan SDM Pensiun dan

Mutasi masuk dan keluar, secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut.

Tabel 1
Pemetaan Kebutuhan Pegawai 2020-2024 BBPOM di Bandung

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Kebutuhan SDM ABK 2020	311	311	311	311	311
SDM Pensiun	1	3	4	1	5
SDM Pindah ke BBPOM di Bandung	1	6	1	1	1
SDM Pindah Keluar BBPOM di Bandung	1	1	0	0	0
SDM yang mengikuti Tugas Belajar	6	8	7	6	6
SDM Tersedia	129	147	144	147	142
Kekurangan SDM	**182**	**164**	**167**	**164**	**169**

Grafik 1
Pemetaan Kebutuhan Pegawai 2020-2024 BBPOM di Bandung

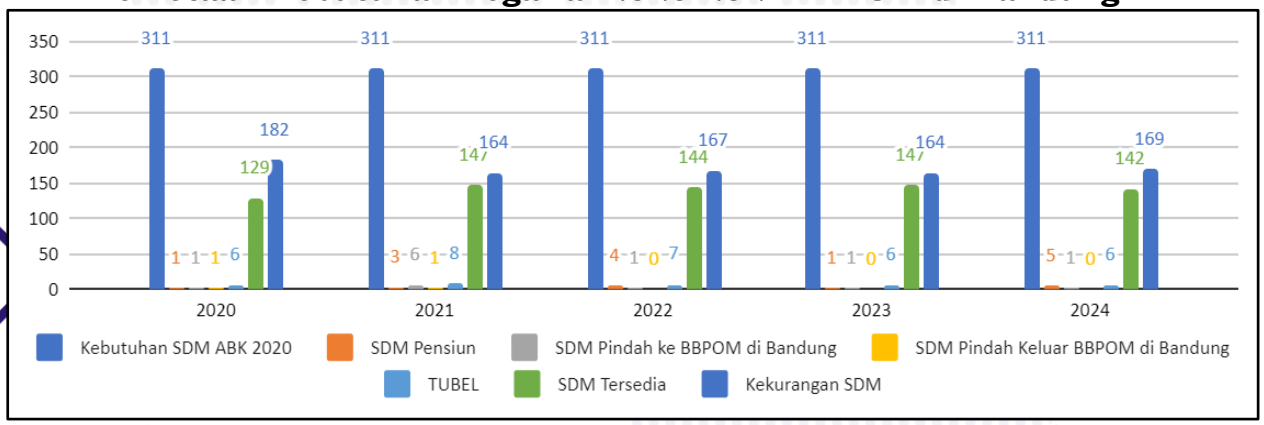

Dalam perkembangannya, terdapat perubahan data jumlah SDM secara dinamis, karena adanya perubahan Organisasi dan Tata Laksana dan Mutasi pegawai, sehingga GAP Pegawai akan selalu disesuaikan. Berdasarkan data SIASN per 21 Februari 2022, jumlah pegawai eksisting adalah 144 pegawai, sehingga GAP kebutuhan pegawai semakin berkurang. Selain itu, berdasarkan data SIASN profil seluruh pegawai eksisting tersebut juga dapat dipetakan dalam gender, tingkat pendidikan dan jabatan sebagai berikut.

1. Profil gender

   Proporsi Jumlah pegawai Perempuan (111) lebih banyak dibandingkan pegawai Laki-Laki (33).

Grafik 2
Profil Gender Pegawai BBPOM di Bandung

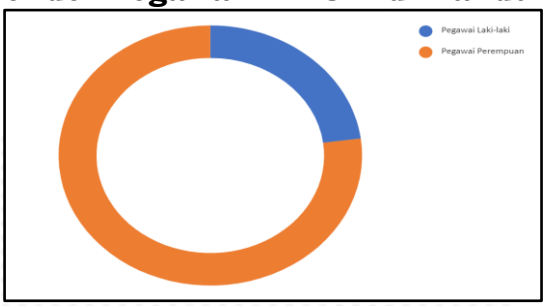

2. Profil Jabatan

   Secara umum, profil Jabatan terbanyak adalah Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (110) selanjutnya adalah Pejabat Fungsional Tertentu (15) dan Pejabat Fungsional Umum (17). Untuk Jabatan Struktural, UPT BBPOM di Bandung terdiri atas Kepala Balai dan Kepala Bagian Tata Usaha.

Grafik 3
Profil Jabatan Pegawai BBPOM di Bandung

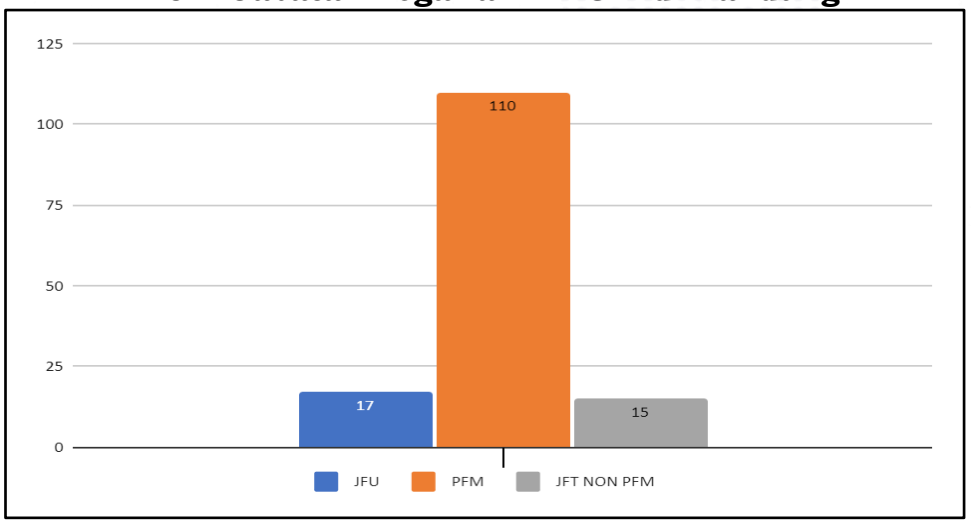

3. Profil Pendidikan

Secara umum, Pendidikan tertinggi Pegawai adalah Strata 2 (S-2) dan Profesi Apoteker dan terendah adalah setingkat Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sekolah Menengah Farmasi. Untuk jumlah pegawai terbanyak adalah Pegawai dengan Pendidikan Profesi Apoteker sejumlah 53 pegawai, seperti dapat dilihat dalam grafik berikut.

Grafik 4
Profil Pendidikan Pegawai BBPOM di Bandung

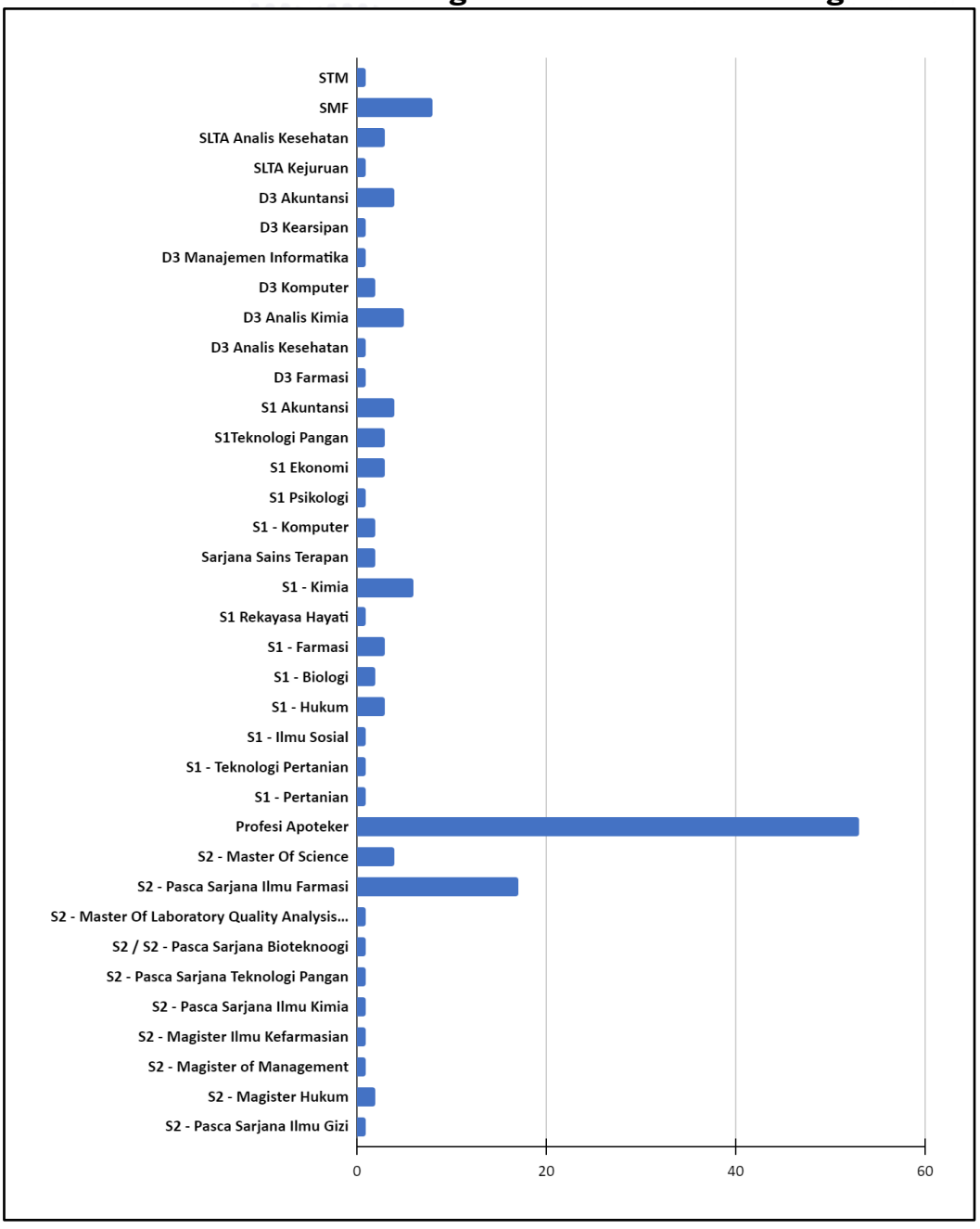

3. Capaian Kinerja BBPOM di Bandung Tahun 2020

Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra BPOM 2020-2024 tersaji dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Bandung Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 2
Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA CAPAIAN
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	*1.* Persentase obat yang memenuhi syarat	80,80%	97,62%	120,82%	120,00%	Tidak dapat disimpulkan
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00%	76,80%	98,46%	98,46%	Baik
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%	94,49%	104,99%	104,99%	Baik
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00%	67,25%	93,40%	93,40%	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**104,42%**	**104,21%**	**BAIK**
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung	*5.* Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72,00%	67,35%	93,54%	93,54%	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**93,54%**	**93,54%**	**BAIK**
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	*6.* Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,00	90,82	109,42%	109,42%	Baik
		7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71,00	75,43	106,24%	106,24%	Baik
		8. Indeks kepuasan	88,5	85,91	97,07%	97,07%	Baik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA CAPAIAN
		masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung					
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**104,24%**	**104,24%**	**BAIK**
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	*9.* Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	87,00%	96,85%	111,32%	111,32%	Sangat Baik
		10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,90%	51,89%	91,20%	91,20%	Baik
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	86,51%	101,78%	101,78%	Baik
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%	56,59%	113,18%	113,18%	Sangat Baik
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00%	73,69%	96,96%	96,96%	Baik
		14. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	3,7	4,2	113,51%	113,51%	Sangat Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**104,66%**	**104,66%**	**BAIK**
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	*15.* Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,43	90,70	104	104	Baik
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	16	100	100	Baik
		17. Jumlah desa pangan aman	6	6	100	100	Baik
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100	100	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**101**	**101**	**BAIK**
6.	Meningkatnya efektivitas	*19.* Persentase sampel Obat yang	82	89,75	109	109	Baik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA CAPAIAN
	pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	diperiksa dan diuji sesuai standar					
		20. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	88,60	108	108	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**109**	**109**	**BAIK**
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	*21.* Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	62,33	84	84	Cukup
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**84**	**84**	**CUKUP**
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	*22.* Indeks RB BBPOM di Bandung	91	80,15	88	88	Cukup
		23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	80,54	99	99	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**94**	**94**	**BAIK**
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	*24.* Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	78,58	105	105	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**105**	**105**	**BAIK**
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	*25.* Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	71,50	94	94	Baik
		26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	132	120	Tidak dapat disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**113**	**107**	**SANGAT BAIK**
11.	Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel	*27.* Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93,00	95,14	102,30%	102,30%	Baik
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (100%)	108,70%	108,70%	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**105,05%**	**105,05%**	**BAIK**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja Balai Besar POM di Bandung melebihi 100 persen, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Merujuk

pada tabel 2, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal antara lain, adanya perubahan kebijakan dari eksternal yang berpengaruh dengan kinerja BBPOM di Bandung selain adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja di atas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Bandung dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Hal tersebut dilakukan guna mendorong peningkatan kinerja dan upaya inovasi dalam rangka perlindungan masyarakat dan mendukung daya saing produk Obat dan Makanan.

Selain kinerja yang disajikan dalam matriks di atas, Balai Besar POM di Bandung juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, antara lain:

- Mengawal vaksin COVID-19 terkait keamanan dan mutu vaksin COVID-19 selama peredaran, antara lain inspeksi sarana/ pengawasan sarana distribusi.
- Pembangunan Laboratorium *Biohazard Standard Laboratorium (BSL) 2* yang dilengkapi dilengkapi dengan fasilitas untuk melaksanakan pengujian COVID-19.
- Uji cepat menggunakan *rapid test* untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19 oleh P3OMN di pusat sebagai koordinator dan 33 laboratorium BB/BPOM yang telah terakreditasi.

4. Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

Dalam Renstra Balai Besar POM di Bandung 2020-2024, Balai Besar POM di Bandung telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Bandung dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra

BBPOM di Bandung tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pandemi Covid-19

Potensi:

1) Peran BBPOM di Bandung sangat dibutuhkan dalam rangka mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin/obat terutama dalam pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.
2) Peran BBPOM di Bandung dibutuhkan dalam mengawal penggunaan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan COVID-19.

Permasalahan:

1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi BBPOM di Bandung masih sangat terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan *pengujian Covid dan Obat Covid.*
2) Meningkatnya produksi dan peredaraan obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BBPOM di Bandung dalam intensifikasi pengawasan baik *postmarket* obat-obatan tersebut.

b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BBPOM di Bandung sebagai salah satu unit pelaksanan teknis diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BBPOM di Bandung mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

1) **Area ke-4 "Pengendalian Penyakit dan Imunisasi"** Kontribusi BPOM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).
2) **Area ke-5 "Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan"** Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu unit pelaksana teknis BPOM ikut berperan aktif dalam Penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study*/PASS).
3) **Area ke-6 "Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)"** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu UPT BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BBPOM di Bandung; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.
4) **Area ke-8 "Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat"** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu UPT BPOM dapat berkontribusi melalui mendukung penuh penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam

rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

Permasalahan:

1) Kesadaran *stakeholder* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmokovigilans masih relatif rendah.
2) Kemampuan laboratorium pengujian obat dan makanan masih belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
3) Masih terbatasnya kapasitas BBPOM di Bandung dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem informasi yang andal.

B. REVIU TERHADAP BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

1. **Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024**, karena tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BPOM. Visi, Misi dan Tujuan BPOM masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 3
Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Visi	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong

Misi	1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan
Tujuan	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu. 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat

	dan Makanan. 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, Indikator, Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024, karena ada perubahan Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, Indikator, Kebijakan dan Strategi BPOM Tahun 2020-2024. Perubahannya adalah penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja BPOM sebagai berikut:

Tabel 4

Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, Kebijakan dan Strategi BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			6. Indeks Pelayanan Publik 7. Persentase UMKM yang memenuhi standar		
		3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan.	1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis system merit. 2. Penguatan pengujian analisi/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM yang optimal		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang		

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			diperiksa dan diuji sesuai standar		
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik.	Persentase UMKM yang memenuhi standar.		
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat. 2. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 3. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 5. Persentase pangan fortifikasi yang	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan.	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh UPT

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			memenuhi syarat		
	2. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/ infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung		
		3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	1. Indeks RB BBPOM di Bandung 2. Nilai AKIP BBPOM di Bandung		

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		4. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung		

3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BBPOM di Bandung

Tidak ada perubahan sasaran kegiatan pada peta strategi BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024, namun demikian dilakukan penambahan, pengurangan serta perubahan Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 dan penyesuaian terhadap target kinerja IKU BBPOM di Bandung yang akan dijelaskan lebih rinci dalam poin D mengenai Reviu terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Adapun sasaran kegiatan dan IKU BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024 sebagaiman tertuang dalam peta strategi BBPOM di Bandung sebagai berikut:

Gambar 3
Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Bandung
Tahun 2020-2024

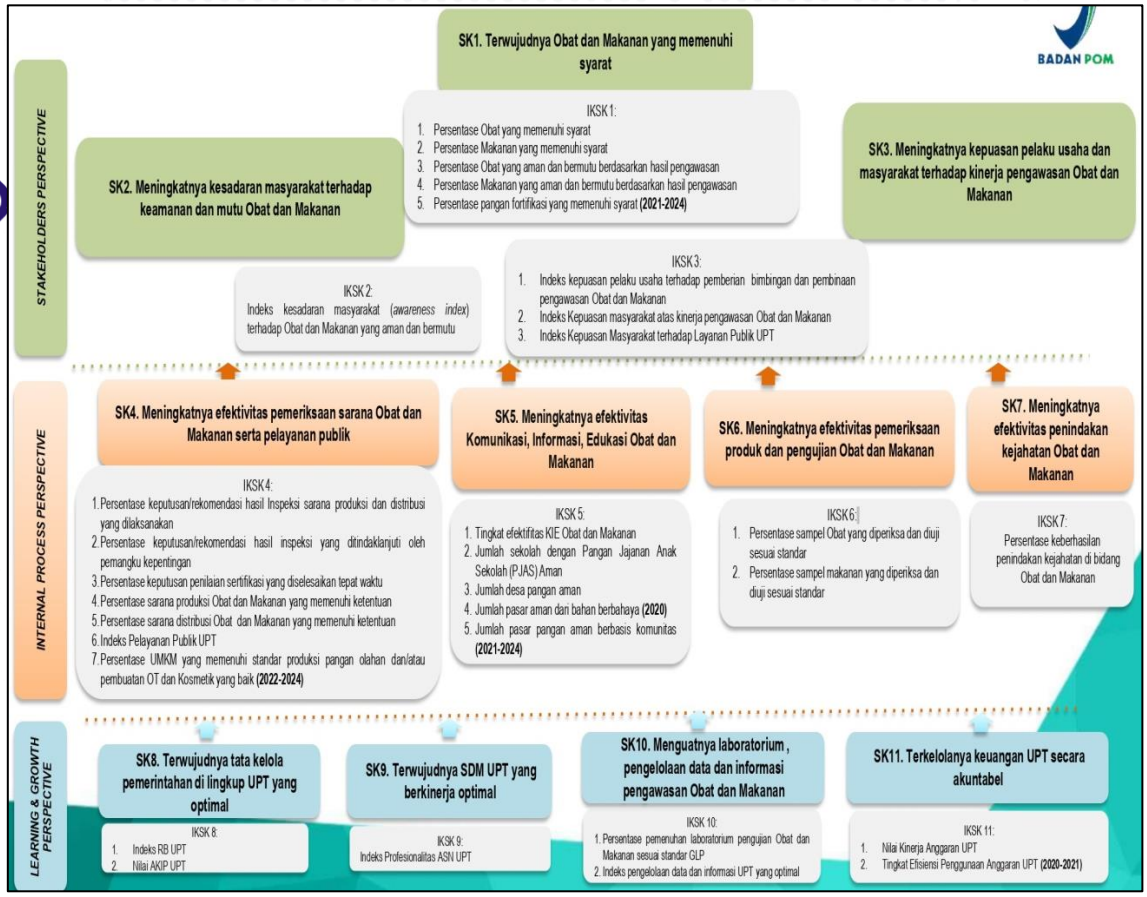

4. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Loka POM

Peta Strategis Loka POM di Bogor dan Loka POM di Tasikmalaya pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 hanya berlaku pada tahun 2020-2021. Pada tahun 2022, Loka POM di Bogor dan Loka POM di Tasikmalaya telah menjadi Satker Mandiri sehingga bukan lagi bagian dari Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024.

Gambar 4
Peta Strategi BSC Loka POM di Bogor dan Loka POM di Tasikalaya Tahun 2020-2024

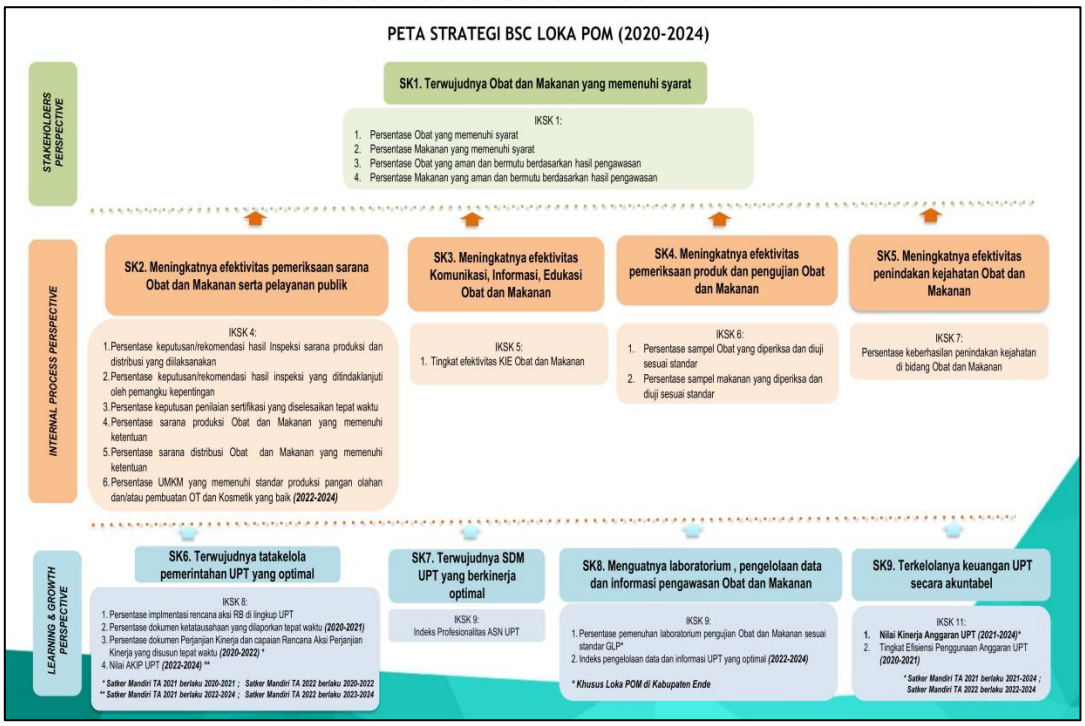

C. REVIU TERHADAP BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan BBPOM di Bandung

Adanya perubahan arah kebijakan BPOM karena perubahan lingkungan strategis terkini, maka Arah Kebijakan BBPOM di Bandung berubah mengacu pada perubahan Arah Kebijakan

BPOM. Beberapa perubahan Arah Kebijakan BPOM sebagai berikut:

a. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap **lembaga riset**.

b. Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BBPOM di Bandung harus lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigmabidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (ultimum remedium) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi "Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan".**

c. Perubahan tata urut Arah Kebijakan BPOM sesuai arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BPOM Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5

Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
	kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat danMakanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan **lembaga riset** dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.**
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Strategi BBPOM di Bandung

Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi BBPOM di Bandung sesuai Strategi BPOM, antara lain:

a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.

b. Melakukan re-grouping strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urut strategi BPOM sesuai dengan perubahan tata urut Arah Kebijakan BPOM.

Secara rinci, perubahan Strategi BBPOM di Bandung mengacu pada perubahan strategi BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 6

Perubahan Strategi BPOM Tahun 2020-2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/ infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan	3. Intensifikasi pembinaan dan

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.	fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan public berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan public berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3. Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan BBPOM di Bandung, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024. Kedua kerangka tersebut masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi BBPOM di Bandung dalam

menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

D. REVIU TERHADAP BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Kinerja BBPOM di Bandung yang digambarkan dalam Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024, tidak terdapat perubahan pada sasaran kegiatan, namun terdapat perubahan pada indikator kinerja yaitu : penambahan 2 (dua) indikator kinerja baru : (1) Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat; dan (2) Persentase UMKM yang memenuhi standar, dan pengurangan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Selain itu, dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja dengan menggunakan baseline baru berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Sehingga jumlah indikator kinerja BBPOM di Bandung sebelumnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) bertambah menjadi 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja. Secara umum target tetap dan meningkat. Namun terdapat target indikator yang turun antara lain:

a. **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**, penurunan target disebabkan realisasinya dibawah target tahun 2020. Penyebab rendahnya realisasi indikstor tersebut adalah: sampel makanan yang disampling secara purposive/targeted, yang tidak memenuhi syarat masih tinggi, sebagian besar berasal dari sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan sampel fortifikasi garam beryodium.

b. **Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu,** penurunan target disebabkan realisasinya dibawah target tahun 2020. Penyebab

rendahnya realisasi indikator tersebut adalah: (1) rendahnya indeks pengetahuan dan indeks perilaku masyarakat terhadap Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat; (2) Persepsi masyarakat terhadap obat dan makanan masih dianggap seperti komoditi biasa pada umumnya yang tidak memerlukan perhatian lebih; (3) masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang Obat dan Makanan.

c. **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan,** penurunan target disebabkan realisasinya dibawah target tahun 2020. Penyebab rendahnya realisasi indikator tersebut adalah: (1) selama wabah/pandemi penyakit, pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan tidak bisa optimal dibandingkan tahun sebelumnya; dan (2) Siklus pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian ke setiap sarana relative lama sehingga kesadaran akan pemenuhan ketentuan relative rendah.

d. **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan** penurunan target disebabkan realisasinya dibawah target tahun 2020. Penyebab rendahnya realisasi indikator tersebut adalah: belum terselesaikannya perkara *carry over* tahun sebelumnya hingga ke penyerahan tahap II karena adanya pandemik Covid-19.

e. **Indeks RB BBPOM di Bandung**, penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun baik pada Indeks RB.

Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7
Perubahan Target Indikator Kinerja BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	97,62	97	97.5	98	98.5
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	76,80	80	82	84	86
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94	94,49	95	95.5	96	96,5
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	67,25	70	72	74	76
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat							70	72	74	76
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83	90,82	71	74	77	80
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87,5	89	75,43	91.1	92.3	93.4	94.6
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	85,91	77.83	80.22	82.62	85.01
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92		89,50	90,50	91,00	92,00
Meningkatnya efektivitas	Persentase keputusan/	87	89	91	93	95	96,85	96	97	98	99

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan										
	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	56,9	63,9	70,9	78	85	51,89	64	71	78	85
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	86,51	88	91	94	97
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70	56,59	57	61	66	70
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82	73,69	74	76	78	80
	Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51	4,2	4,35	4,45	4,51	4,55
	Persentase UMKM yang memenuhi standar							-	77	79	81
Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83	90,70	92	93.8	95.7	97.6
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104	16	42	76	112	150
	Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47	6	19	28	37	47
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	8	13	18	23	2	8	13	18	23
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai	82	85	88	91	94	89,75	100	100	100	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	standar										
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	84	86	88	90	88,60	100	100	100	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90	62,33	65	67	69	71
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95	80,15	82.8	83.8	84.8	85.8
	Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92	80,54	83	85.5	88	90.5
Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85	78,58	79	80	81	82
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90	71,50	79	84	89	94
	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3	2	2	2.25	2.5	3
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97	95,14	95.1	95.3	95.6	95.9
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (100%)	Efisien (95%)	-	-	-

2. Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung

Pada Tahun Anggaran (TA) 2021 karena adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Pengangaran (RSPP) yang diterbitkan oleh suprasistem (Kementerian Keuangan dan Bappenas) maka dilakukan perubahan stuktur Rencana Kerja (Renja) BPOM, salah satunya pada Satker UPT yaitu dari semula hanya terdapat 1 (satu) Program dan Kegiatan yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" menjadi 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu "Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Program Dukungan Manajemen" melalui "Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM".

Tabel 8

Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung

No.	Program/Kegiatan (Semula)	Program/Kegiatan (Menjadi)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Tetap
2	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Tetap
3		Program Dukungan Manajemen
4		Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan BBPOM di Bandung secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan POM dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga

deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja Balai Besar POM di Bandung 2020-2024.

E. REVIU TERHADAP LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran kegiatan dan IKU BBPOM di Bandung serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020 serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja BBPOM di Bandung. Hal tersebut berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan indikator baru serta penghapusan, penyesuaian dan pergeseran sasaran dan indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPOM Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BPOM sebagai berikut:

Tabel 9

Matriks Perubahan Kegiatan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja BBPOM di Bandung

Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelakasana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023	2024			
Program Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung								Program Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung										BBPOM di Bandung
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung								Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3		1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,62	97	97.5	98	98.5	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.	BBPOM di Bandung
	2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	76,80	80	82	84	86	Pro PN		BBPOM di Bandung
	3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,49	95	95.5	96	96,5	-		BBPOM di Bandung
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67,25	70	72	74	76	-		BBPOM di Bandung
									5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		70	72	74	76	Pro PN	Semula merupakan indikator pada Ditwas Pangan Risiko Rendah dan Sedang (Unit Kerja OTK Lama),	BBPOM di Bandung

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelakasana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Realisasi 2020	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024			
															dipindahkan ke UPT disesuaikan denganUnit Organisasi yang melaksanakan sampling dan pengujian pangan fortifikasi	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung							Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung								
	1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83		1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	67,35	71	74	77	80	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung							Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung								
	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat	83	85	86	87,5	89		1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	90,82	91.1	92.3	93.4	94.6	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelakasana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023	2024			
		dan Makanan								pengawasan Obat dan Makanan								
	2.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83		2.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,43	77.83	80.22	82.62	85.01	-		BBPOM di Bandung
	3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92		3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	85,91	89,50	90,50	91,00	92,00	-		BBPOM di Bandung
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
	1.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95		1.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,85	96	97	98	99	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	2.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	56,9	63,9	70,9	78	85		2.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	51,89	64	71	78	85	-		BBPOM di Bandung

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelakasana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023	2024			
		dilaksanakan								dilaksanakan								
	3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97		3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86,51	88	91	94	97	-	Tidak dilakukan penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70		4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56,59	57	61	66	70	Pro PN	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82		5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,69	74	76	78	80	Pro PN		BBPOM di Bandung
	6.	Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51		6.	Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	4,2	4.35	4.45	4.51	4.55	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.12.21.683 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
									7.	Persentase UMKM yang memenuhi standar		-	77	79	81	Pro PN	Merupakan indikatorbaru pada UPTuntuk peningkatan peran pembinaan UMKM yang selama ini secara umum telah dilakukan oleh UPT namun belum dihitung sebagai kinerja dalam	BBPOM di Bandung

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelakasana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023	2024			
																	indikator tersendiri	
	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung								Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung								Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	
	1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83		1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,70	92	93.8	95.7	97.6	-		BBPOM di Bandung
	2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104		2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	42	76	112	150	Pro PN		BBPOM di Bandung
	3.	Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47		3.	Jumlah desa pangan aman	6	19	28	37	47	Pro PN		BBPOM di Bandung
	4.	Jumlah pasar aman dari Bahan Berbahaya	4	8	13	18	23		4.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	8	13	18	23	Pro PN		BBPOM di Bandung
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
	1.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94		1.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89,75	100	100	100	100	Pro PN	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570	BBPOM di Bandung
	2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa	82	84	86	88	90		2.	Persentase sampel makanan yang	88,60	100	100	100	100	Pro PN		BBPOM di Bandung

SEMULA							MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelakasana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Realisasi 2020	Target							
		2020	2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024				
	dan diuji sesuai standar							diperiksa dan diuji sesuai standar									
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung							Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90		1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	62,33	65	67	69	71	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung							Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
	1. Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95		1. Indeks RB BBPOM di Bandung	80,15	82.8	83.8	84.8	85.8	-	Penurunan target Disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu dilakukan	BBPOM di Bandung

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelakasana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023	2024			
																	penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun	
	2.	Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92		2.	Nilai AKIP BBPOM di Bandung	80,54	83	85.5	88	90.5	-	Dilakukan penyesuaian kembali Target terhadap trend kenaikan per tahun	BBPOM di Bandung
	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal								Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal									
	1.	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85		1.	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	78,58	79	80	81	82	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan									
	1.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90		1.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	71,50	79	84	89	94	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	2.	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3		2.	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2	2	2.25	2.5	3	-		BBPOM di Bandung

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelakasana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023	2024			
	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel								Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel									
	1.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97		1.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95,14	95.1	95.3	95.6	95.9	-	Dilakukan penyesuaian kembali targetterhadap trend kenaikan per tahun	BBPOM di Bandung
	2.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)		2.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (100%)	Efisien (95%)	-	-	-	-	Mulai tahun 2022-2024 target indikator ini dihapus karena sudah terdapat indikator Nilai Kinerja Anggaran	BBPOM di Bandung

Tabel 10
Matriks Perubahan Kegiatan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor
Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024

SEMULA								MENJADI								Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*	
Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Bogor								Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Bogor								
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor							
	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3		1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,72	97	97,5	98	98,5	
	2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94,59	85	87	89	91	
	3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,44	94	95	95,5	96	
	4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00	80	82	83	85	
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor							
	1.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95		1.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,83	96	97	99	10	
	2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75		2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,67	60	65	70	75	
	3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	85	88	91	94	97		3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	46,49	88	90	92	94	

SEMULA								MENJADI								Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*	
		diselesaikan tepat waktu								diselesaikan tepat waktu						
	4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70		4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67,44	67	71	75	79	
	5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82		5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,90	75	77	79	80	
									6.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	81	
	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor							
	1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	71	74	77	81	84		1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,11	90.0	90.9	91.8	92.7	
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor							
	1.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	50		1.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50	50	50	50	
	2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	50		2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50	50	50	50	
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor							
	1.	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65	70	75	78	82		1.	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	43,00	70	74	78	82	

SEMULA								MENJADI								Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*	
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal								Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal							
	1.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT	80	85	90	95	100		1.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT	136,36	100	100	100	100	
	2.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	100		2.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00	100	-	-	-	
	3.	Persentase dokumen perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100		3.	Persentase dokumen perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100	-	-	-	
									4.	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Bogor	-	78.9	80.6	82.2	83.9	
									Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Bogor							
									1.	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Bogor	-	-	2,25	2,5	3	
	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal								Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal							
	1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor	75	77	80	82	85		1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor	85,00	85,2	85,4	85,6	85,8	
	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel								Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel							
	1.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)		1.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor	100,00	Efisien (92%)	-	-	-	

Keterangan:

* Mulai Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Bogor telah menjadi Loka POM Satker Mandiri dan membuat Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2024, sehingga kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2024 tidak lagi menjadi bagian dari Renstra Balai Besar POM di Bandung.

Tabel 11

Matriks Perubahan Kegiatan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kota TasikmalayaTahun 2020-2024

SEMULA								MENJADI								Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*	
Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tasikmalaya								Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tasikmalaya								
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya							
	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3		1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,36	97	97,5	98	98,5	
	2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85,71	85,5	87	88,5	90	
	3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,30	96	96,5	97	97,5	
	4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62,50	62,5	65	68	70	
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya							
	1.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95		1.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,64	90	92	93	95	
	2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75		2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	33,75	50	55	60	65	
	3.	Persentase keputusan	85	88	91	94	97		3.	Persentase keputusan	60,00	88	90	93	95	

SEMULA								MENJADI								Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*	
		penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu								penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu						
	4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70		4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61,29	61	66	70	75	
	5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68	71		5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	84,41	84	86	88	90	
									6.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	81	
	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya							
	1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	74	77	81	84		1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,88	89.5	91.3	93.1	95.0	
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya							
	1.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	50		1.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50	50	50	50	
	2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	50		2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50	50	50	50	
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya							
	1.	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di	65	70	75	78	82		1.	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di	100,00	70	74	78	82	

SEMULA								MENJADI								Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*	
		bidang Obat dan Makanan								bidang Obat dan Makanan						
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal								Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal							
	1.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT	80	85	90	95	100		1.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT	100,00	100	100	100	100	
	2.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	100		2.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	97,73	100	-	-	-	
	3.	Persentase dokumen perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100		3.	Persentase dokumen perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100	-	-	-	
									4.	Nilai AKIP Loka POM di Kota Tasikmalaya	-	78.9	80.6	82.2	83.9	
									Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tasikmalaya							
									1.	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tasikmalaya	-	-	2,25	2,5	3	
	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal								Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal							
	1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tasikmalaya	75	77	80	82	85		1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tasikmalaya	75,94	77	78	79	80	
	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel								Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel							
	1.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota	Efisien (88%)	Efisien (89%)	Efisiien (90%)	Efisien (91%)	Efisien (92%)		1.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota	100,00	Efisien (92%)	-	-	-	

SEMULA								MENJADI								Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*	
		Tasikmalaya								Tasikmalaya						

Keterangan:

*Mulai Tahun 2021 Loka POM di Kota Tasikmalaya telah menjadi Loka POM Satker Mandiri dan membuat Renstra Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2024, sehingga kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2024 tidak lagi menjadi bagian dari Renstra Balai Besar POM di Bandung

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

a. Reviu Renstra BBPOM di Bandung dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja BBPOM di Bandung yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Bandung.

b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra BBPOM di Bandung yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra BBPOM di Bandung masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

2. Rekomendasi

a. Hasil reviu Renstra BBPOM di Bandung 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja BBPOM di Bandung serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra BBPOM di Bandung.

b. BBPOM di Bandung selaku unit pelaksana tenis BPOM melakukan reviu Renstra Unit Organisasi Satuan Kerja mengacu pada hasil reviu Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB III
PENUTUP

Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra BBPOM di Bandung tersebut. Reviu Renstra BBPOM di Bandung dilakukan untuk menyeleraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja BBPOM di Bandung sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra BBPOM di Bandung dapat teroperasionalisasikan dan diimpelementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan BBPOM di Bandung agar memperhatikan hasil reviu Renstra BBPOM di Bandung. BBPOM di Bandung sebagai salah satu Unit Organisasi dan Satuan Kerja di Lingkungan BPOM telah melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra BBPOM di Bandung dengan memperhatikan hasil reviu Renstra BPOM. Melalui reviu Renstra BBPOM di Bandung ini, diharapkan BBPOM di Bandung terus dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Balai Besar POM di Bandung

BADAN POM

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.
NIP. 19650713 199103 2 001

BADAN POM

Jalan Pasteur Nomor 25, Bandung

bandung.pom.go.id

BPOMBandung

@bpombandung

@BPOMBandung

BalaiBesarPOMdiBandung

KABAYAN
Ka Balai Melayani
08112440533

Si Iteung
0821 2893 6046

1500533
HALOBPOM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG **WBK MENUJU WBBM!**

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT & MAKANAN DI BANDUNG JUARA!

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif